1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Kabupaten Cilacap selama periode April–Juni 2026 menunjukkan kecenderungan **inflasi yang meningkat secara tahunan, namun relatif terkendali secara bulanan**. Pada April 2026, Kabupaten Cilacap mengalami **deflasi m-to-m sebesar 0,21%**, dengan inflasi **y-on-y sebesar 2,23%** dan inflasi **y-to-d sebesar 0,87%**. Deflasi terutama dipengaruhi oleh penurunan harga **daging ayam ras, angkutan antar kota, telur ayam ras, emas perhiasan, dan cabai rawit**. Sementara itu, tekanan inflasi masih berasal dari **minyak goreng, beras, bakso siap santap, mie, dan cabai merah**.

Memasuki Mei 2026, terjadi **inflasi m-to-m sebesar 0,31%**, inflasi **y-on-y sebesar 3,22%**, dan inflasi **y-to-d sebesar 1,18%**. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas pangan, khususnya **cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah**, yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan dan berkurangnya pasokan. Permintaan yang meningkat menjelang Idul Adha turut memberikan tekanan terhadap harga cabai, sedangkan harga **telepon seluler** juga meningkat akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan krisis chip. Komoditas yang memberikan tekanan inflasi terbesar secara bulanan antara lain **cabai merah, cabai rawit, bawang merah, telepon seluler, dan udang basah**.

Pada Juni 2026, inflasi Kabupaten Cilacap tercatat **0,10% secara m-to-m**, **2,88% secara y-on-y**, dan **1,28% secara y-to-d**. Tekanan inflasi bulanan terutama berasal dari kelompok **Transportasi dengan andil 0,14%**, khususnya komoditas **bensin**, sementara kelompok **Makanan, Minuman dan Tembakau justru memberikan andil deflasi sebesar 0,13%**. Dari sisi pangan, kenaikan harga **bawang merah, bawang putih, dan beras** masih perlu mendapat perhatian karena dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dan distribusi yang belum merata. Di sisi lain, kebijakan kenaikan harga BBM turut memberikan tekanan terhadap kelompok transportasi.

Secara keseluruhan, perkembangan harga selama April–Juni 2026 menunjukkan bahwa **komoditas pangan dan transportasi menjadi faktor penting dalam pembentukan inflasi daerah**. Komoditas pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain **beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras**, karena pergerakan harganya cukup dipengaruhi oleh kondisi pasokan, distribusi, cuaca, serta perubahan permintaan masyarakat. Sementara itu, pada kelompok transportasi, perkembangan harga **BBM/bensin** menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi karena dapat memberikan dampak lanjutan terhadap biaya distribusi dan harga barang.

Risiko ke depan yang perlu diwaspadai meliputi potensi kenaikan harga komoditas pangan apabila terjadi gangguan pasokan maupun distribusi, kenaikan harga komoditas strategis menjelang periode permintaan tertentu, serta dampak lanjutan perubahan harga BBM terhadap biaya transportasi dan distribusi barang. Selain itu,

perkembangan nilai tukar rupiah dan kondisi pasar komoditas juga perlu menjadi perhatian, terutama terhadap barang yang memiliki keterkaitan dengan komponen impor. Dengan demikian, **pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis, penguatan koordinasi pengendalian inflasi, serta kelancaran distribusi bahan pangan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Cilacap ke depan**.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada April 2026, permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Cilacap terutama berkaitan dengan **fluktuasi harga komoditas pangan dan transportasi**. Meskipun secara umum terjadi deflasi sebesar 0,21% (m-to-m), masih terdapat kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti **minyak goreng, beras, bakso siap santap, mie, dan cabai merah**. Di sisi lain, penurunan harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit turut menahan tekanan inflasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa **keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan permintaan komoditas pangan masih menjadi permasalahan yang perlu dikendalikan**, khususnya untuk menjaga agar kenaikan harga pada komoditas tertentu tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas.

Pada Mei 2026, permasalahan pengendalian inflasi terutama berasal dari **meningkatnya harga komoditas pangan akibat tingginya permintaan dan berkurangnya pasokan**. Kenaikan harga cabai merah dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang baik dan tingginya permintaan, sedangkan cabai rawit mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha. Harga bawang merah juga meningkat karena permintaan yang tinggi dan pasokan yang berkurang. Selain komoditas pangan, kenaikan harga **telepon seluler** yang dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan krisis chip menjadi faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pengendalian harga.

Pada Juni 2026, permasalahan pengendalian inflasi bergeser terutama pada **tekanan harga transportasi dan beberapa komoditas pangan**. Kelompok Transportasi menjadi penyumbang utama inflasi bulanan dengan andil sebesar 0,14%, terutama berasal dari komoditas **bensin**. Di sektor pangan, berkurangnya pasokan bawang putih di sejumlah wilayah, berkurangnya pasokan bawang merah, serta distribusi beras yang belum merata menyebabkan kenaikan harga komoditas tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa **kelancaran distribusi, kecukupan pasokan pangan, serta dampak perubahan harga BBM terhadap biaya transportasi dan distribusi** menjadi permasalahan utama yang perlu diantisipasi dalam pengendalian inflasi daerah.

Secara keseluruhan, permasalahan pengendalian inflasi Kabupaten Cilacap selama April–Juni 2026 menunjukkan adanya perubahan sumber tekanan inflasi, mulai dari **fluktuasi harga pangan pada April, peningkatan permintaan dan keterbatasan pasokan pada Mei, hingga tekanan transportasi dan distribusi**

serta pasokan pangan pada Juni. Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu diarahkan pada pemantauan ketersediaan dan harga komoditas pangan strategis, penguatan kelancaran distribusi, serta antisipasi terhadap dampak perubahan harga energi dan peningkatan permintaan pada periode tertentu.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Cilacap pada Triwulan II Tahun 2026 mencakup :

1. Keterjangkauan Harga

a. Kegiatan Sembako Murah Kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap

Sembako murah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap pada triwulan II dilaksanakan dengan menjual sembako bersubsidi kepada masyarakat. Sembako tersebut dijual dalam bentuk paket yang terdiri dari 3 kg beras premium, minyak goreng premium 1 liter, dan gula Kristal putih atau gula pasir premium 1 kg, dan masyarakat dapat melakukan penebusan paket tersebut dengan harga Rp. 5.000,- dengan sasaran masyarakat kurang mampu atau tidak mampu. Pelaksanaan sembako murah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap pada triwulan II dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi dengan jadwal dan jumlah paket sebagai berikut :

No	Jadwal	Tempat	Jumlah Paket
1	Rabu, 10 Juni 2026	Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten	322
2	Rabu, 10 Juni 2026	Desa Bringkeng, Kecamatan Kawunganten	192
3	Rabu, 10 Juni 2026	Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten	192

b. Kegiatan Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok

Monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilaksanakan di Pasar Sidodadi yang menjadi pasar pantuan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) setiap hari kerja. Pada triwulan II tahun 2026 bulan April dilaksanakan sebanyak 21 kali, bulan Mei sebanyak 16 kali, dan bulan Juni sebanyak 20 kali. Selanjutnya, data hasil pantauan tersebut diinput di aplikasi SP2KP yang kemudian menjadi dasar penentuan kebijakan pemerintah.

c. Gerakan Pangan Murah

Maksud dan tujuan : Dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai salah satu upaya menekan laju inflasi daerah. Selama triwulan 2 tahun

2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 13 kali dari tanggal 5 April – 28 Juni 2026 dengan tema Gerakan Pangan Murah bagi Masyarakat (Gapuramas) pada momen Car Free Day (CFD) bertempat di Alun – alun Cilacap. Total bahan pangan yang terjual setara 15.632 kg senilai sekitar Rp 317.452.500,-. Para vendor yang turut berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah untuk Masyarakat (GAPURAMAS) ini antara lain : Gapoktan Rejamulya, Gapoktan Margo Dadi Maju, Peternak Telur Kesugihan, Asosiasi Petani Hortikultura Cilacap (PHC), Toko Minyak Goreng Cilacap (MGC), Toko Hana Makmur, Toko Primaboga Cilacap, dan Super Indo Cilacap.

Sumber anggaran : APBD Kabupaten Cilacap, dan Mandiri.

d. Kios Pangan Murah

Maksud dan tujuan : Dilaksanakan dalam rangka mengurangi harga jual toko mitra dari produsen/penyedia bahan pangan dengan cara memfasilitasi biaya distribusi pengiriman bahan pangan dari lokasi penyedia ke lokasi toko mitra. Kegiatan ini pada periode Triwulan II, dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Bahan pangan yang terfasilitasi berupa Beras Medium sebanyak 1.800 kg dengan fasilitasi distribusi sebesar Rp 1.200/1 kg, dan Telur Ayam Ras sebanyak 600 kg dengan fasilitasi distribusi sebesar Rp 2.000/1 kg. Sebagai penyedia/produsen adalah yaitu Pabrik Penggilingan Padi Manunggal Sari Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja untuk komoditas beras, dan Kelompok Tani Manunggal Sari Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja untuk komoditas telur ayam ras. Toko Mitra sebagai Kios Pangan Murah (KPM) yang terlibat sebanyak 6 (enam) toko yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu : Cipari, Kedungreja, Gandrungmangu, Patimuan.

Sumber anggaran : APBD Provinsi Jawa Tengah.

e. Kegiatan Pemantauan Harga Ikan di Kabupaten Cilacap

Kegiatan Pemantaun harga ikan di lakukan rutin setiap bulan pada tingkat konsumen. Pengamatan harga ikan di beberapa pedagang di pasar sidodadi dan pasar tanjung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ketersedian dan harga ikan yang sering di minati oleh masyarakat untuk di konsumsi. Kegiatan ini bersifat no budgeter, kondisi harga ikan selama triwulan 2 tersaji dalam tabel berikut, selama triwulan 2 harga ikan cenderung stabil.

f. Kegiatan Pelayanan Pemberian Rekomendasi BBM bagi Nelayan

Kegiatan pemberian rekom bbm di lakukan Dinas Perikanan Kab. Cilacap bertujuan untuk membantu pemilik kapal dalam memperoloh BBM bersubsidi. Terpenuhinya BBM bersubsidi dapat mendukung ketersedian ikan hasil tangkapan, Kegiatan ini dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kab. Cilacap. Selama periode triwuan 2 tahun

2026 total Rekomendasi BBM untuk Penerbitan Baru jenis solar yang sudah di terbitkan 452 pemilik kapal dan untuk jenis pertalite 423 pemilik kapal, sedangkan untuk Perpanjangan Terbit jenis solar sebanyak 543 pemilik kapal dan jenis pertalite 732 pemilik kapal.

g. Program Sembako

Jumlah penerima bantuan Bansos sembako di Kabupaten Cilacap berjumlah 159.253 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Bantuan yang sudah tersalurkan pertanggal 27 Juli 2026 berjumlah 149.090 KPM. Bantuan yang diterima Rp. 200.000/bulan dan disalurkan per 3 bulan.

h. bantuan PKH

Jumlah penerima bantuan PKH di Kabupaten Cilacap berjumlah 70.670 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Jumlah bantuan yang diterima berbeda-beda disesuaikan dengan komponen kesehatan, pendidikan dan Kesejahteraan Sosial yang ada dikeluarga KPM tersebut. Untuk Bansos PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali.

i. Kajen (Kartu Jawa Tengah Ngopeni)

KaJeN merupakan singkatan dari Kartu Jateng Ngopeni, yaitu program bantuan sosial (Banjamsos) dari pemerintah daerah di Jawa Tengah yang ditujukan untuk masyarakat miskin tidak produktif.

Penerima KaJeN dikabupaten Cilacap berjumlah 553 KPM. Bantuan berupa uang tunai Rp1.200.000,- untuk tahap 1 dan 2 (Januari – Juni). Penyaluran dilaksanakan melalui Bank Jateng.

j. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa) Triwulan II

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap selaku OPD yang membina pemerintah desa ikut memfasilitasi dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – Dana Desa) yang telah berhasil menyalurkan bantuan langsung tunai kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sampai dengan bulan Mei Tahun 2026 dengan nominal sebesar Rp. 300.000,00 perbulan per KPM yang bertempat di Balai Desa masing-masing.

Dari 269 desa di kabupaten Cilacap sudah tersalurkan selama lima bulan (bulan Januari - Mei) kepada 2.786 KPM BLT Dana Desa dengan serapan anggaran mencapai Rp. 3.052.750.000,- dari total pagu BLT Dana Desa Rp. 7.308.600.000,- atau 42%. Penyaluran dibagi menjadi beberapa termin yang dimulai pada tanggal 4 - 12 Mei 2026. dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu warga agar dapat bertahan dalam masa-masa sulit dan memastikan kesejahteraan mereka, terutama bagi yang

rentan dan kurang mampu.

2.Ketersediaan Pasokan

a. Pengembangan Kawasan Bawang Merah

Pengendalian inflasi daerah melalui penguatan ketahanan pangan di triwulan I dilanjutkan dengan gerakan menanam bawang merah TSS (biji) varietas maserati di triwulan ke II pada kegiatan pengembangan hortikultura APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan total luas tanam 6 Ha yang tersebar di Kecamatan Sampang (1 Ha), Kecamatan Adipala (4 Ha),dan Kecamatan Maos (1 Ha). Selain itu, terdapat kegiatan tanam umbi bawang merah varietas tajuk di kecamatan binangun seluas 1 Ha. Kegiatan ini bertujuan membantu menjaga kontinuitas pasokan bawang merah sehingga fluktuasi harga dapat ditekan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga bawang merah sebagai salah satu komoditas strategis penyumbang inflasi.

b. Pengembangan Kawasan Cabe Rawit

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi hortikultura sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Pengembangan Hortikultura yang didanai APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 melaksanakan pengembangan kawasan cabai rawit seluas 20 Ha dengan menggunakan benih cabai rawit varietas Ori 212. Pengembangan kawasan tersebut dilaksanakan pada enam kecamatan yang memiliki potensi pengembangan cabai rawit, yaitu Kecamatan Adipala seluas 5 Ha, Kecamatan Maos seluas 3 Ha, Kecamatan Kawunganten seluas 3 Ha, Kecamatan Majenang seluas 3 Ha, Kecamatan Cimanggu seluas 3 Ha, dan Kecamatan Karangpucung seluas 3 Ha.

Pengembangan kawasan ini diharapkan meningkatkan produksi cabai rawit secara berkelanjutan, ketersediaan pasokan sepanjang tahun dapat terjaga, serta mampu mendukung upaya pengendalian inflasi daerah khususnya di provinsi jawa tengah.

c. Panen Bawang Merah

Kegiatan panen bawang merah varietas Tajuk telah dilaksanakan oleh Kelompok Tani Taruna Tani Hortikultura, Desa Sidaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap melalui bantuan benih bawang merah APBD Kab Cilacap Tahun Anggaran 2026. Budidaya bawang merah dilaksanakan pada lahan seluas 1 hektar dengan menggunakan benih berupa umbi sebanyak 873,7 kilogram.

Penerapan budidaya yang baik, didukung penggunaan benih bermutu serta pemeliharaan tanaman yang optimal, menghasilkan produksi bawang merah yang baik. Hasil panen dari luas tanam tersebut diperoleh sebesar kurang lebih 8 ton umbi bawang merah. Hasil panen ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketersediaan pasokan bawang merah di Kabupaten Cilacap. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi anggota kelompok tani, keberhasilan budidaya ini juga menjadi salah satu upaya mendukung pengembangan sentra bawang merah di Cilacap khususnya di kecamatan Binangun.

d. Kegiatan Pengendalian Inflasi pada Komoditas Tanaman Pangan oleh Dinas Pertanian

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap terus melaksanakan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi tanaman pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengusulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) serta penyaluran sarana produksi (saprodi) berupa benih unggul guna mendorong peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT), menjaga kesinambungan produksi, dan menjamin ketersediaan stok pangan, khususnya beras. Pelaksanaan program didukung oleh berbagai sumber pendanaan, yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN.

Pada Triwulan II Tahun 2026, penyaluran bantuan benih padi dilaksanakan melalui beberapa program. Bantuan benih padi KSA yang bersumber dari APBD Provinsi memiliki sasaran seluas 3.500 hektar, dengan realisasi penyaluran hingga Triwulan II mencapai 1.801 hektar. Selanjutnya, bantuan benih padi untuk kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) Brigade Pangan memiliki sasaran seluas 2.910 hektar, dengan realisasi penyaluran seluas 625 hektar. Program bantuan benih padi Reguler Tahap I ditargetkan untuk areal seluas 8.520 hektar dan hingga Triwulan II telah terealisasi seluas 3.409 hektar, sedangkan Program Padi Reguler Tahap II memiliki sasaran seluas 6.362 hektar yang proses penyalurannya berlangsung sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Dinas Pertanian juga menyalurkan bantuan benih padi melalui kegiatan BRMP seluas 14 hektar, bantuan benih padi hibrida yang bersumber dari APBD Kabupaten seluas 20 hektar, serta bantuan benih padi varietas toleran salinitas (padi salin) seluas 20 hektar sebagai upaya optimalisasi lahan terdampak salinitas untuk mendukung peningkatan produksi padi. Di samping komoditas padi yang berperan langsung dalam menjaga stabilitas harga beras, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap juga memberikan perhatian terhadap pengembangan komoditas jagung. Jagung merupakan salah satu bahan baku utama pakan ternak sehingga ketersediaannya berpengaruh terhadap biaya produksi dan stabilitas harga komoditas peternakan, khususnya telur ayam ras dan daging ayam. Oleh karena itu, peningkatan produksi jagung menjadi salah satu

langkah strategis dalam mendukung pengendalian inflasi secara tidak langsung.

Pada Triwulan II Tahun 2026, peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) jagung didukung melalui penyaluran bantuan benih dari berbagai program, yaitu bantuan benih jagung yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan sasaran seluas 25 hektar, bantuan benih jagung APBD Provinsi dengan sasaran 300 hektar, untuk Triwulan II telah terealisasi penyalurannya seluas

140 hektar, serta bantuan benih jagung Reguler hasil yang merupakan usulan Polresta Cilacap dengan sasaran seluas 300 hektar.

Melalui pelaksanaan berbagai program tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi tanaman pangan, memperluas areal tanam, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis. Peningkatan produksi padi diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sedangkan peningkatan produksi jagung diharapkan dapat mendukung stabilitas harga komoditas peternakan melalui terjaganya ketersediaan bahan baku pakan. Dengan demikian, berbagai kebijakan tersebut diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Cilacap sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

e. Kegiatan Restocking Di Kabupaten Cilacap

Kegiatan Restocking di laksanakan di 2 Kecamatan di Kabupaten Cilacap yaitu Kecamatan Wanareja dan Kecamatan Dayeuhluhur dengan jumlah 61.915 ekor ikan nilem yang di tebar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Cilacap dengan total anggaran sebesar 55 juta. kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan ketersedian ikan di perairan umum darat sehingga tidak cepat habis dan lestari,ikan yang di restocking adalah ikan endemik yang terdapat di perairan umum darat kegiatan ini nantinya dapat di manfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

f. Sosialisasi dan Penyaluran Bantuan TERAS B2SA

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah melalui penguatan ketahanan pangan rumah tangga dan penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan Sosialisasi Teras B2SA dan Penyaluran Bantuan Teras B2SA Tahun 2026.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Rabu, 6 Mei 2026 bertempat di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap dengan peserta Ketua Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani (KWT) calon penerima bantuan serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) wilayah binaan. Materi yang disampaikan meliputi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan oleh Teguh Imam Purwanto, S.Pt., M.M.,

Sosialisasi Kegiatan Teras B2SA Tahun 2026 oleh Syeh M. B. A. A., S.TP., serta Pemanfaatan Pekarangan dengan Budidaya Itik Petelur, Tanaman Buah dan Sayur untuk Mendukung Konsumsi Pangan B2SA oleh Sumargo, A.Md.. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai tujuan program, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan bantuan, serta peran pendampingan dalam mewujudkan pekarangan pangan yang produktif.

Selanjutnya dilakukan penyaluran bantuan Teras B2SA kepada 19 Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Cilacap. Bantuan yang diberikan kepada setiap kelompok terdiri atas benih sayuran (cabai rawit, cabai merah besar, caisim, tomat, kangkung, dan terong), bibit alpukat, polibag, gembor, cangkul, cetok, waring, drum plastik, pupuk kandang, sekam, 100 ekor itik betina umur 5–6 bulan, serta 25 zak pakan itik petelur.

Melalui kegiatan ini diharapkan kelompok penerima mampu mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan dan peternakan itik petelur sehingga dapat meningkatkan ketersediaan pangan bergizi di tingkat rumah tangga, mendukung diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, serta memberikan kontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan ketersediaan pasokan pangan di masyarakat.

g. KUBE (Kelompok Usaha Bersama)

Bantuan sosial ini berbentuk hibah/stimulan modal usaha yang berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan disalurkan secara langsung kepada kelompok masyarakat miskin (terdaftar dalam DTKS/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Nominal Rp20.000.000 ini dialokasikan untuk satu kelompok yang terdiri dari 10 orang anggota.

KUBE penerima bantuan permodalan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2026 berjumlah 17 KUBE yang tersebar di 16 Desa yang terletak di 10 Kecamatan. KUBE bergerak dibidang usaha industri olahan makanan, peternakan, pertanian, perdagangan.

h. UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

Bantuan UEP adalah hibah stimulan modal usaha perorangan bagi warga miskin atau rentan miskin yang sudah memiliki embrio/rencana usaha tetapi terkendala keterbatasan modal. Bantuan UEP berasal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Bantuan sebesar Rp2.500.000 ini disalurkan secara non-tunai (transfer bank) langsung ke rekening penerima dan diprioritaskan untuk pembelian alat bantu/sarana kerja atau bahan baku usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif.

Jumlah penerima bantuan UEP di Kabupaten Cilacap pada tahun 2026 berjumlah 44 orang yang berada di 8 Kecamatan.

i. CSR S2P PT SUMBER SEGARA PRIMADAYA (S2P) PLTU CILACAP

Bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk 3 kelompok Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Cilacap senilai Rp10.000.000, bantuan ini merupakan bentuk kemitraan strategis antara BUMN atau Perusahaan Swasta setempat dengan Pemerintah Daerah (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan merupakan langkah nyata perusahaan dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi warga lokal (terutama di ring 1 atau wilayah operasional PLTU).

KUBE penerima bantuan CSR S2P PLTU CILACAP :

1. KUBE Amanah Jaya Bersama Kecamatan Jeruklegi;
2. KUBE Bringkeng Farm Kecamatan Kawunganten;
3. KUBE Menda Waras Slamet Kecamatan Gandrungmangu.

3. Kelancaran Distribusi

a. Fasilitasi Distribusi Pangan

Maksud dan tujuan: Dilaksanakan dalam rangka intervensi ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan cara memotong rantai pasok distribusi dan memfasilitasi biaya yang dikeluarkan oleh penyedia bahan pangan sebelum didistribusikan ke penjual. Selama triwulan II tahun 2026, kegiatan fasilitasi distribusi pangan telah dilaksanakan pada bulan April – Juni 2026. Komoditas pangan yang di distribusikan sampai bulan Juni 2026 yaitu Beras Medium sebanyak 2.200 kg dengan fasilitasi distribusi sebesar Rp.1.400/ kg (untuk biaya tenaga kerja : giling, sortasi, kemas, bongkar, muat, dan transportasi). Sampai dengan bulan April – Juni 2026, pendistribusian beras fasilitasi distribusi pangan dialokasikan untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Car Free Day (CFD) Alun – alun Kabupaten Cilacap. Gapoktan yang terlibat antara lain: Gapoktan Rejamulya Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Gapoktan Margo Dadi Maju Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan. Sumber anggaran : APBD Kabupaten Cilacap dan Mandiri.

b. Rekomendasi BBM JBT/JBKP

Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini bertujuan untuk mewujudkan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara tepat sasaran dan tepat volume kepada konsumen pengguna, khususnya di sektor transportasi. Penerima manfaat meliputi moda transportasi air yang menggunakan motor tempel, baik untuk kepentingan angkutan umum maupun perorangan. Rekomendasi BBM ini berlaku selama tiga bulan sejak surat diterbitkan.

Dengan demikian, rekomendasi BBM ini tidak hanya mendukung peningkatan pelayanan transportasi, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan upaya pengendalian inflasi di daerah. Hal ini karena stabilnya harga transportasi dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Berikut data kebutuhan volume BBM pada Triwulan II (April – Juni) :

c. Penanganan Long Segment Gandrungmanis – Bulusari (DAK Fisik)

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan Penanganan Long Segment ruas Gandrungmanis–Bulusari di Kecamatan Gandrungmangu melalui pemeliharaan berkala, peningkatan, dan rekonstruksi jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp8.744.700.000 dengan capaian fisik sebesar 100 persen dan telah selesai dilaksanakan. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari Program Penyelenggaraan Jalan pada subkegiatan Rekonstruksi Jalan dengan nilai kontrak sebesar Rp8.532.058.000 dan estimasi output berupa peningkatan kondisi jalan sepanjang 2,929 km.

Pelaksanaan peningkatan ruas jalan Gandrungmanis–Bulusari memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun distribusi barang. Ruas jalan ini mendukung akses menuju ibu kota Kecamatan Gandrungmangu, simpul transportasi Stasiun Gandrungmangu, fasilitas pelayanan publik Puskesmas Gandrungmangu, serta berbagai fasilitas pendidikan. Selain itu, ruas tersebut terhubung langsung atau mendukung konektivitas dengan Jalan Nasional ruas Tambakreja–Bantarsari (JLS/Pansela) dan Jalan Provinsi ruas Bantarsari–Sidareja–Cukangleuleus. Ketersediaan jalan yang lebih baik juga memperlancar akses menuju pusat kegiatan ekonomi dan Pasar Gandrungmangu, sehingga dapat mendukung efisiensi mobilitas dan distribusi barang serta memperlancar rantai pasok komoditas antarwilayah.

d. Penanganan Long Segment Jepara Wetan – Widarapayung (DAK Fisik)

DPUPR Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan Penanganan Long Segment ruas Jepara Wetan–Widarapayung di Kecamatan Binangun melalui kegiatan peningkatan dan rekonstruksi jalan yang bersumber dari DAK Fisik. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp4.356.000.000 dengan capaian fisik sebesar 100 persen dan telah selesai dilaksanakan. Pekerjaan merupakan bagian dari Program Penyelenggaraan Jalan pada subkegiatan Rekonstruksi Jalan dengan nilai kontrak sebesar Rp4.127.361.000 dan estimasi output berupa peningkatan kondisi jalan sepanjang 2,152 km.

Peningkatan ruas jalan Jepara Wetan–Widarapayung berperan dalam memperkuat konektivitas Kecamatan Binangun dengan pusat pemerintahan, pelayanan publik, serta

pusat kegiatan ekonomi. Ruas ini mendukung akses menuju ibu kota Kecamatan Binangun, Puskesmas Binangun, dan fasilitas pendidikan tingkat SD, SMP, SMA/SMK. Selain itu, ruas jalan tersebut terhubung langsung atau mendukung Jalan Provinsi ruas Adipala–Bodo/Ayah (JLS/Pansela), sekaligus menjadi akses menuju Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) Kecamatan Binangun yang memiliki komoditas utama padi. Dengan semakin baiknya kondisi jalan, mobilitas hasil produksi pertanian dari kawasan produksi menuju pusat konsumsi dan perdagangan dapat berlangsung lebih lancar dan efisien. Ruas ini juga mendukung akses menuju Pasar Binangun sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap kelancaran distribusi barang dan stabilitas rantai pasok pangan di wilayah Kabupaten Cilacap.

e. Penanganan Long Segment Jl. Ky. M. Syuhud Majenang (DAK Fisik)

DPUPR Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan Penanganan Long Segment Jalan Ky. M. Syuhud di Kecamatan Majenang melalui Program Penyelenggaraan Jalan pada subkegiatan Rekonstruksi Jalan yang bersumber dari DAK Fisik. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp6.363.425.000 dengan capaian sebesar 94 persen dan pada Triwulan II Tahun 2026 masih berada dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan tersebut memiliki estimasi output berupa peningkatan kondisi jalan sepanjang 2,211 km.

Kegiatan peningkatan jalan ini memiliki fungsi penting dalam mendukung konektivitas Kecamatan Majenang dengan pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, kawasan produksi pangan, dan pusat perdagangan. Ruas Jalan Ky. M. Syuhud mendukung akses menuju ibu kota Kecamatan Majenang, RSUD Majenang, serta fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA/SMK. Ruas tersebut juga terhubung langsung atau mendukung konektivitas dengan Jalan Nasional ruas Batas Provinsi Jawa Barat–Karangpucung (Batas Kabupaten Cilacap/Banyumas). Di samping itu, ruas jalan menjadi salah satu akses menuju Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) Kecamatan Majenang dengan komoditas padi dan menuju pusat ekonomi Pasar Majenang. Dengan demikian, penyelesaian pekerjaan ini diharapkan semakin memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi komoditas, khususnya hasil produksi pangan dari kawasan produksi menuju pusat perdagangan dan konsumsi, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok antarwilayah.

f. Penanganan Long Segment Maos Kidul – Karangrena (DAK Fisik)

DPUPR Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan Penanganan Long Segment ruas Maos Kidul–Karangrena di Kecamatan Maos melalui Program Penyelenggaraan Jalan pada subkegiatan Rekonstruksi Jalan yang bersumber dari DAK Fisik. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.832.875.000 dengan capaian fisik sebesar 100 persen dan telah selesai dilaksanakan. Pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.386.690.000 dengan estimasi output berupa peningkatan kondisi jalan sepanjang 0,444 km.

Peningkatan ruas Maos Kidul–Karangrena mendukung aksesibilitas menuju ibu kota Kecamatan Maos, fasilitas pelayanan publik Puskesmas Maos, serta fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA/SMK. Ruas jalan ini juga terhubung langsung atau mendukung konektivitas dengan Jalan Nasional ruas Kesugihan–Maos–Sampang dan menjadi salah satu akses menuju Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) Kecamatan Maos yang memiliki komoditas utama padi. Selain mendukung mobilitas masyarakat, peningkatan kualitas jalan turut memperlancar akses dari kawasan produksi menuju pusat perdagangan dan distribusi, khususnya Pasar Maos. Kondisi tersebut mendukung kelancaran arus barang dan hasil pertanian serta meningkatkan efisiensi distribusi komoditas pangan dari sentra produksi menuju pasar dan konsumen.

g. Penanganan Long Segment Paketingan – Mernek (DAK Fisik)

DPUPR Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan Penanganan Long Segment ruas Paketingan–Mernek di Kecamatan Sampang melalui Program Penyelenggaraan Jalan pada subkegiatan Rekonstruksi Jalan yang bersumber dari DAK Fisik. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.452.000.000 dengan capaian fisik sebesar 100 persen dan telah selesai dilaksanakan. Pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.378.451.000 dengan estimasi output berupa peningkatan kondisi jalan sepanjang 0,906 km.

Peningkatan ruas Paketingan–Mernek memiliki peran dalam mendukung konektivitas wilayah Kecamatan Maos dan Sampang, khususnya dalam menunjang mobilitas masyarakat, pelayanan publik, dan kegiatan perekonomian. Ruas ini mendukung akses menuju Puskesmas Maos, rumah sakit di Sampang, serta fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA/SMK di wilayah Maos dan Sampang. Selain itu, ruas jalan terhubung langsung atau mendukung Jalan Nasional ruas Kesugihan–Maos–Sampang dan menjadi akses menuju Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) Kecamatan Maos dan Sampang yang menghasilkan komoditas padi. Peningkatan kondisi jalan juga mendukung akses menuju pusat ekonomi Pasar Maos dan Pasar Sampang. Dengan konektivitas jalan yang lebih baik, distribusi hasil produksi pangan dari kawasan produksi menuju pasar dapat berjalan lebih lancar, sehingga mendukung efisiensi rantai pasok dan kelancaran distribusi komoditas antarwilayah.

h. Pelatihan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa (Bansus)

Pelatihan Bansus ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus (Bansus) pada tanggal 23 – 29 April 2026 di Ruang Rapat Dispermades Lantai 3. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasi Kesejahteraan di masing-masing desa yang terbagi menjadi lima angkatan. Kegiatan ini berisi tentang tata cara penyusunan proposal pengajuan pencairan, tata cara penyusunan rencana penggunaan dana dan tata cara pengadaan barang dan jasa.

Narasumber berasal dari Kasi/Pejabat yang membidangi Bansus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan gambaran tata cara pelaksanaan bansus agar sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bansus, sudah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bansus secara sampling ke Desa dan ternyata ditemukan beberapa masalah seperti : papan nama kegiatan sudah tidak terpasang, prasasti belum terpasang, kegiatan belum selesai, hasil kegiatan sudah mulai rusak dan TPK tidak paham pekerjaan. Oleh sebab itu dengan adanya fasilitasi pelatihan bansus agar dalam pelaksanaannya tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

i. Pelatihan TPK Bansus

Pelatihan TPK Bansus dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap dan peserta dari TPK Bansus di Desa.

Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai narasumber yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, Kabid. Pengembangan Sumber Daya Penataan Permukiman dan Lingkungan Desa, Ketua Tim Kerja Penataan Permukiman dan Lingkungan Desa, dan Pelaksana pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Penataan Permukiman dan Lingkungan Desa.

Tujuan dilaksanakannya pelatihan TPK bansus antara lain untuk meningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur desa agar lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya, serta menunjang efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa. Memastikan pembangunan desa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan transparan. Membantu TPK dan pelaksana kegiatan dalam tugasnya di lapangan agar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

j. TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2026

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap bersama Kodim 0703 Kabupaten Cilacap telah berhasil menyelenggarakan TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2026 di Cilacap yang dilaksanakan di Desa Buntu Kecamatan Kroya mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Annisa Fabriana membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2026 di Desa Buntu Kecamatan Kroya dan upacara penutupan dipimpin Komandan Kodim 0703/Cilacap Letkol Inf. Andi Azis selaku Dansatgas TMMD.

Penutupan TMMD yang dilaksanakan sejak 22 April hingga 21 Mei 2026 ini ditandai

dengan penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan TMMD, dengan sasaran pembangunan fisik dan nonfisik yang seluruhnya selesai 100 persen. Sasaran fisik utama meliputi pembangunan talud kanan dan kiri sepanjang 1.617 meter dengan tinggi 1 meter dan lebar 0,3 meter. Talud sepanjang lebih dari 1,6 kilometer dalam waktu 30 hari menjadi capaian luar biasa karena didukung kolaborasi lintas sektoral dan keterlibatan masyarakat. Di bidang nonfisik, TMMD menghadirkan berbagai pelayanan dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain pelayanan administrasi kependudukan, pembuatan akta kelahiran dan KIA paket 3 in 1, pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan KB, perpustakaan keliling, pengobatan hewan ternak dan hewan peliharaan, hingga pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru.

Kegiatan TMMD ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dan masyarakat melalui budaya gotong royong.

k. Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Kabupaten Cilacap

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah sekaligus mendorong aktivitas perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara rutin menyelenggarakan kegiatan Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Kabupaten Cilacap selama Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Minggu pada bulan April, Mei, dan Juni 2026 dengan melibatkan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, serta berbagai perangkat daerah dan pihak terkait.

Kegiatan CFD menjadi salah satu sarana untuk memperluas pemasaran produk UMKM dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaannya turut diselenggarakan **Bazar Beras Murah SPHP dan lapak tani dari Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap**, sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut secara tidak langsung mendukung upaya menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat.

Selama Triwulan II Tahun 2026, kegiatan CFD juga diisi dengan berbagai kegiatan pendukung, antara lain kegiatan olahraga masyarakat, pertunjukan seni dan musik, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, perpustakaan keliling, layanan konseling rehabilitasi narkoba, serta kegiatan promosi produk dan layanan masyarakat. Jumlah pedagang yang berpartisipasi berkisar **200–400 pedagang setiap pelaksanaan**, dengan jumlah pengunjung mencapai sekitar **1.500–5.000 orang**. Jenis usaha yang dominan meliputi makanan dan minuman, mainan, tanaman hias, pakaian, serta produk ekonomi kreatif lainnya.

Dengan demikian, pelaksanaan CFD selama Triwulan II Tahun 2026 memberikan kontribusi dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, memperluas pemasaran produk UMKM, serta menyediakan alternatif akses masyarakat terhadap komoditas pangan dengan harga terjangkau melalui bazar pangan dan lapak tani. Kegiatan ini

menjadi salah satu bentuk sinergi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus penguatan perekonomian masyarakat.

4. Komunikasi Efektif

a. Pemantauan harga tingkat konsumen dan produsen

Pemantauan harga tingkat konsumen dan produsen dilaksanakan oleh Petugas Enumerator Ketahanan Pangan sumber anggaran APBD Kabupaten Cilacap dan Petugas Panel Harga Pangan sumber anggaran APBN Badan Pangan Nasional. Titik pantau yaitu di Pasar Sidodadi dan Pasar Gede Cilacap, peternak ayam, peternak telur, pejagalan daging sapi, dan pedagang ecer di 18 kecamatan. Bahan pangan yang dilakukan pemantauan harga antara lain : Beras Premium, Beras Medium, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam Ras, Gula Pasir Konsumsi, Minyak Goreng Curah, Jagung peternak, Ikan Kembung, Ikan Tongkol, Ikan Bandeng, Garam Beryodium, Tepung Terigu, Beras SPHP, Daging Sapi Hidup, Ayam Tingkat Peternak, Telur Ayam Tingkat Peternak.

- Data hasil pemantauan petugas Enumerator Ketahanan Pangan sumber anggaran APBD Kabupaten Cilacap dapat dilihat di :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/117nXYqhevV0XAgj7yUrGEpC6gJvCMa4TbTUcaKrLlSY/edit?usp=sharing

- Data hasil pemantauan petugas Enumerator Panel Harga Badan Pangan Nasional sumber anggaran APBN dapat dilihat di : https://panelharga.badanpangan.go.id/

b. Kegiatan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Budidaya Ikan Baik bagi Pembudidaya Ikan

Kegiatan CPIB dan CBIB di lakukan oleh Dinas Perikanan Kab.Cilacap sebanyak 2 x kegiatan pelatihan pada triwulan 2 tahun 2026, kegiatan ini di laksanakan dengan menggunakan anggaran sumber dana ABPD Kab.Cilacap sebesar 13 juta untuk pelaksanaan 2x kegiatan dengan peserta pelatihan sebanyak 40 pelaku pembudidaya ikan , tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan, meningkatkan daya saing produk, serta menjaga kelestarian lingkungan sehingga produk ikan yang di hasilkan dari budidaya di setiap kelompoknya serta dapat di manfaatkan dengan baik dan aman oleh masyarakat dan dapat mendukung ketersediaan ikan hasil budidaya untuk konsumen

c. Diversifikasi Olahan Ikan

Kegiatan Diversifikasi Olahan Ikan dilaksanakan sebanyak **2 kali pada Triwulan II Tahun 2026** dengan sumber anggaran APBD Kabupaten Cilacap sebesar **Rp5.000.000**

dan diikuti oleh **40 orang pelaku usaha perikanan**. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk olahan ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta membuka peluang usaha baru bagi pelaku usaha. Selain itu, kegiatan ini mendukung **ketersediaan pangan bergizi dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat**, serta berkontribusi dalam mendukung program penurunan angka stunting di Kabupaten Cilacap.

d. Pantauan Pasar Segar Aman Masyarakat Sehat (PAPASAN MASE)

Program Pantauan Pasar Segar Aman Masyarakat Sehat (PAPASAN MASE) merupakan kegiatan pengawasan keamanan pangan yang dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten Cilacap sebagai upaya menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pangan olahan, serta mendukung keamanan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan ini bertujuan melakukan deteksi dini terhadap potensi cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan PSAT, serta memberikan edukasi kepada produsen, pedagang, dan masyarakat mengenai pentingnya pangan yang aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan PAPASAN MASE Tahun 2026 dilaksanakan pada:

1. Kamis, 21 Mei 2026
   - Pasar Gandrungmangu
   - Pasar Kawunganten
   - SPPG Kecamatan Kawunganten
2. Kamis, 25 Juni 2026
   - Pasar Pelemgading
   - Pasar Adipala
3. Jumat, 12 Juni 2026

Monitoring dan Verifikasi SLHS SPPG Nusawungu, Danasri Lor 2, Mujur, Karangturi serta peninjauan calon SPPG Desa Jenang Kecamatan Majenang.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Cilacap pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum berjalan dengan baik melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dari sisi perkembangan harga, inflasi bulanan relatif terkendali, yaitu deflasi 0,21% pada April,

inflasi 0,31% pada Mei, dan inflasi 0,10% pada Juni. Namun demikian, masih terdapat tekanan pada beberapa komoditas pangan, terutama cabai, bawang merah, bawang putih, dan beras, serta komoditas transportasi berupa bensin.

Intervensi melalui Gerakan Pangan Murah, Sembako Murah, Kios Pangan Murah, serta pemantauan harga telah membantu menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat. Dari sisi pasokan, pengembangan bawang merah, cabai rawit, padi, dan jagung mendukung penguatan produksi pangan daerah. Sementara itu, fasilitasi distribusi pangan dan peningkatan infrastruktur jalan turut mendukung kelancaran distribusi komoditas.

Secara keseluruhan, kebijakan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas harga. Namun, perlu penguatan pada aspek kesinambungan pasokan, pemerataan distribusi, serta kecepatan respons terhadap kenaikan harga komoditas strategis agar pengendalian inflasi lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis, terutama beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, dan daging ayam.
2. Memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Kios Pangan Murah pada wilayah dan waktu yang mengalami kenaikan harga atau gangguan pasokan.
3. Meningkatkan produksi dan kesinambungan pasokan pangan melalui pengembangan bawang merah, cabai, padi, dan jagung serta penguatan pendampingan kepada petani.
4. Memperlancar distribusi pangan dari sentra produksi ke pasar melalui fasilitasi distribusi dan peningkatan konektivitas/infrastruktur jalan.
5. Mengantisipasi dampak kenaikan biaya transportasi dan BBM terhadap biaya distribusi dan harga barang kebutuhan pokok.
6. Memperkuat koordinasi TPID dan pemanfaatan data harga sebagai dasar pengambilan keputusan dan respons cepat terhadap gejolak harga.
7. Menjaga daya beli masyarakat rentan melalui optimalisasi penyaluran bantuan sosial dan program pangan terjangkau.

Dengan langkah tersebut, pengendalian inflasi di Kabupaten Cilacap diharapkan semakin responsif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.